

HUNTING FOR SOLOMON'S RING IN SALT ISLAND: THE HISTORY OF HADRAMI DIASPORA IN SUMENEP, 1832-1901

Rahmat Hidayat^{1*}, Ahmad Athoillah²

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
rahmathidayat1997@mail.ugm.ac.id¹, ahmad.athoillah@mail.ugm.ac.id²
*Corresponding author

Received April 30, 2024; Revised May 03, 2024; Accepted May 04, 2024; Published May 04, 2024

ABSTRACT

This article aims to narrate historically the social transformation and economic behavior of the Arab-Hadrami colony in Sumenep. Therefore, a socio-economic historical approach is employed in this research. The researcher engages in archival accuracy, synthesizing data, and presenting it within a historiographical framework. The study findings reveal that the formation of the Arab colony in Sumenep is attributed to the paternalistic relationship established between Arab-Hadrami traders and Sultan Abdurrahman. Socially and religiously based relationship facilitated the migration of Arab traders to Sumenep while also creating economic prosperity for them. However, following the Sultan's demise, the social ties between the Sumenep nobility and Arab traders began to diminish. Secondly, the colonial government's reorganization of Sumenep successfully opened up the island of Madura to the international market through the salt commodity. On the other hand, the reorganization of Sumenep stimulated the mobility of Arab-Hadrami trade, opening up new economic spaces such as maritime trade and salt transportation for them, and establishing capitalist relationships between Arab-Hadrami traders and the Sumenep nobility through the credit system.

Keywords: Change, Socio-Economy, Arab-Hadrami, Sumenep

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menarasikan secara historis transformasi sosial dan perilaku ekonomi dari koloni Arab-Hadrami di Sumenep. Oleh karena itu, pendekatan sejarah sosial-ekonomi digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan akurasi data arsip kolonial mensintesis data, dan menyajikannya dalam kerangka historiografi. Penelitian menghasilkan temuan bahwa pembentukan koloni Arab di Sumenep dibangun berdasarkan hubungan paternalistik yang terjalin antara pedagang cum pedakwah Arab-Hadrami dengan Sultan Abdurrahman. Relasi sosial-keagamaan keduanya memfasilitasi migrasi pedagang Arab ke Sumenep, menciptakan kemakmuran ekonomi bagi mereka dan membukan peluang ekonomi baru di Sumenep Namun, setelah wafatnya Sultan, ikatan sosial antara bangsawan Sumenep dan pedagang Arab mulai mengendur. Kedua, reorganisasi pemerintah kolonial di Sumenep berhasil membuka pulau Madura ke pasar internasional melalui komoditas garam. Di sisi lain, reorganisasi Sumenep menstimulasi mobilitas perdagangan Arab-Hadrami, membuka ruang ekonomi baru seperti perdagangan maritim dan transportasi garam bagi mereka, serta membentuk relasi kapitalis antara pedagang Arab-Hadrami dengan Bangsawan Sumenep melalui sistem kredit.

Kata Kunci: Perubahan, Sosio-Ekonomi, Arab-Hadrami, Sumenep

PENDAHULUAN

Selat Madura menjadi “laut keluarga” yang digunakan untuk lalu lintas pelayaran dan perdagangan laut yang menghubungkan bagian barat dan bagian timur dari kepulauan Nusantara. Sebagai jalur persimpangan bagi perdagangan, Selat Madura menjembatani terjadinya perluasan kekuasaan politik, penyebaran agama, dan budaya. Di bibir Selat Madura terdapat kota-kota pantai yang menjadi sumbu perdagangan. Salah satunya adalah Sumenep yang memiliki bandar perdagangan internasional yaitu Pelabuhan Kalianget (Tjiptoatmodjo, 1983, p. 16).

Sumenep dengan pelabuhannya memiliki daya tarik bagi pedagang Asing seperti pedagang Arab-Hadrami. Migrasi mereka dari Hadramaut ke Pulau Garam—meminjam istilah L.W.C. van den Berg (2010, p. 113)—untuk “mencari cincin Nabi Sulaiman” atau mengadu nasib dan mencari penghidupan. Sebagai kota-kota pantai lainnya, penduduk Sumenep pada awal abad ke-19 merepresentasikan masyarakat yang heterogen. Menurut J. Hageman dalam Tjiptoatmodjo, orang-orang Timur Asing telah menempati Sumenep. Pada 1815, tercatat Sumenep dihuni oleh 114.896 pribumi, 8.528 Cina, dan 680 Arab, India dan sebagainya (Tjiptoatmodjo, 1983, p. 14).

Kedatangan pedagang Arab-Hadrami di Sumenep mendapatkan momentumnya pada masa kepemimpinan Sultan Abdurrahman/Sultan Pakunataningrat I (1811-1854). Hal ini disebabkan raja Sumenep memiliki status politik yang inklusif bagi pedagang Arab-Hadrami sehingga mereka bermigrasi dan menjalin hubungan patronase dengan raja Sumenep. Pada puncaknya, mereka membentuk sebuah komunitas yang eksklusif di Sumenep pada 1832 yang menjadi titik awal pembahasan artikel ini.

Pada masa Sultan, interaksi pedagang Arab-Hadrami dengan Aristokrat mencerminkan relasi patrimonial. Akan tetapi, ketika Sultan Sumenep mangkat dan pemerintah kolonial menerapkan reformasi administratif di Sumenep pada 1833, hubungan keduanya mengalami perubahan. Di samping itu, pembukaan ekonomi Madura kemudian memberikan pengaruh dan stimulus ekonomi bagi diaspora Arab sehingga mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi

Berangkat dari persoalan itu, artikel ini berupaya untuk menelaah perilaku sosial-ekonomi komunitas Hadrami di Sumenep dalam merespon perubahan sosial yang terjadi di Sumenep pada abad ke-19. Guna mempermudah memahami pokok permasalahan di atas, artikel mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa orang-orang Arab-Hadrami memilih Sumenep sebagai tempat untuk berdiaspora? Kedua, bagaimana perilaku sosial-ekonomi orang Hadrami di tengah perubahan sosial yang terjadi di Sumenep?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial-ekonomi. Menurut Sartono Kartodirdjo, seluruh proses sejarah merupakan representasi dari suatu perubahan sosial yang multidimensional. Perubahan sosial itu adalah gejala yang inheren dalam setiap perkembangan suatu kelompok atau masyarakat. Secara organis, apa yang mengalami perubahan dalam suatu komunitas tidak hanya dibatasi pada peningkatan kuantitas kelompok, tetapi berfokus juga pada peningkatan kemampuan dan adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya (Kartodirdjo, 1992, pp. 160–162).

Disamping itu, sejarah sosial memiliki keterkaitan erat dengan sejarah ekonomi (Kuntowijoyo, 2003, p 39). Dalam penelitian ini, perilaku sosial-ekonomi Hadrami di Sumenep dipahami sebagai fungsi adaptasi (ekonomi), integrasi (sosial), mempertahankan diri (budaya), dan memberi orientasi tujuan (politik) (Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, 2013, p. 163). Dari pendekatan di atas, penelitian ini menempuh metode penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013, pp. 73–82). Arsip-arsip kolonial, karya LWC van den Berg, dan Babad Sumenep menjadi rujukan utama bagi penelitian ini.

Selanjutnya, tujuan artikel ini adalah untuk mengisi kekosongan historiografis mengenai komunitas Hadrami di Sumenep. Hal ini disebabkan kajian kontemporer mengenai Sejarah Madura didominasi oleh tema Pesantren, Santri/Kiai dan Nahdlatul Ulama (NU) (Abd A'la, Mukhammad Zamzami, dan Nur Hidayat Wakhid Udin, 2018; Karim, 2009; Mansurnoor, 1992; Pribadi, 2013, 2015). Disamping itu, kajian mengenai etnis Tionghoa-Madura relatif memadai daripada kajian mengenai Hadrami (Onghokham, 2017; Siddiq, 2021). Tujuan kedua adalah berupaya merekonstruksi sejarah diaspora Arab-Hadrami yang bukan hanya seorang pedakwah agama saja.

Kajian mengenai sejarah sosial Hadrami di Sumenep belum mendapatkan porsi yang proporsional dalam historiografi Madura. Selain itu, penulisan sejarah diaspora Hadrami di Nusantara hanya terfokus pada kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Gresik, Pekalongan, Yogyakarta, dan Solo. Ahmad Athoillah (2018, pp. 150–170) mendiskusikan tentang pembentukan identitas sosial Hadrami di Jakarta abad 18 sampai 20. Rizal Nasser dan Sulasman (2020, pp. 247–268) membahas mengenai perkembangan sosial-ekonomi Hadrami di Pekojan-Jakarta pada masa kontemporer. Karya Fatiyah (2016, pp. 201-209) mendiskusikan peleburan identitas ke-Arab-an komunitas Arab dengan identitas ke-Jawa-an pada abad 20. Sementara itu, buku Artono (2021) membahas tentang sejarah komunitas Hadrami di Surabaya pada awal abad ke-20. Sebagian besar sejarah diaspora Hadrami di Nusantara menekankan pada dimensi sosial-politik komunitas Arab-Hadrami pada awal abad ke-20 (Algadri, 1996, p. 15; Hidayatullah & Adam, 2022, pp. 141-142; Husain Haikal, 2019, p. 20; Mobini-Kesheh, 1999, pp. 150-155; Rabith Jihan Amaruli, Nazala Noor Maulany, 2018, pp. 121–132; Subarkah, 1990, pp. 147-158).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Sosial-Ekonomi Sumenep Abad ke-19

Sumenep merupakan wilayah paling timur di Pulau Madura. Ia memiliki bandar perdagangan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Kalianget. Sebagai salah satu kota pantai utama di Selat Madura, banyak pedagang asing yang masuk ke Sumenep pada awal abad ke-19. Pada masa Raffles, penduduk Sumenep telah merepresentasikan masyarakat heterogen yang terdiri dari 105,305 pribumi, 1040 Tionghoa, 247 orang Melayu dan Bugis, 680 jiwa Arab dan India, kemudian 327 jiwa orang Eropa (Raffles, 1978, p. 73; Tjiptoatmodjo, 1983, p. 289). Menurut Denys Lombard (1996, p. 87), masyarakat majemuk yang berciri utama agama Islam telah lama terbentuk di kawasan pantai-pantai Nusantara. Masyarakat yang menetap di pesisir mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pelaut, pengakut, dan pedagang.

Berdasarkan catatan Jenderal Clark, pada 31 Desember 1813, Kalianget sudah membangun hubungan perdagangan dengan wilayah Jawa dan luar Jawa. Beberapa-barapa barang perdagangan yang diekspor dari Sumenep ke Jawa dan Luar Jawa sangat beragam di antaranya garam, ikan asing, anyaman rotan, kain, asam jawa, pot, tembakau, kapur, kacang boco, agar-agar, minyak jarak dan sebagainya (ANRI, Madoera, 1813, pp. 1-9). Pada pertengahan abad ke-19, Madura mengalami transformasi sosial ekonomi sebagai dampak dari ekspansi kapitalisme yang berkembang di Pulau Jawa. Perubahan itu ditandai dengan penerapan pemerintahan langsung dan kerajaan Sumenep dihapuskan pada pada November 1883 (KITLV, Koloniaal Verslag, 1885, p. 02)

Reformasi administrasi ini bertujuan untuk memuluskan agenda liberalisasi ekonomi Pemerintah kolonial atas wilayah koloninya. Intervensi langsung terhadap Sumenep memudahkan pemerintah kolonial untuk mengekstraksi potensi ekonomi yang ada (garam). Dengan demikian, neraca perdagangan pemerintah kolonial akan mengalami surplus yang besar (Jonge, 2011, p. 21).

Selanjutnya, reorganisasi sistem politik ini menjadikan perdagangan di Sumenep menjadi lebih ekstensif. Sejak pertengahan kedua abad ke-19, Sumenep menjalin hubungan perdagangan (ekspor-impor) dengan Singapura, Riau, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Banda dan Bima (Kuntowijoyo, 2017, p. 137). Ditambah lagi, warung dan toko-toko kecil mulai tumbuh di distrik Kota Sumenep. Berdasarkan catatan kolonial pada 24 Januari 1898, Sumenep memiliki 1149 warung dan pasar sebanyak 32 (ANRI, Algemene Secretarie Verslagen Madoera, 1897, p. 4).

Secara administratif, pada 1879, Sumenep memiliki 14 distrik yaitu Kota Luar, Kota Dalam, Timur Daya, Timur Laut, Barat laut, Barat Daya, Pulau Kangean, Pulau Sapudi, Pulau raa, Pulau Gili Genting, Pulau Giliang, Pulau Poteran, Pulau Tjabia, Pulau Gili Raja (Delpher.nl, Regeerings Almanak, 1879, p. 196). Sebagian besar mata pencaharian penduduk Sumenep berkisar pada pertanian, pelayaran laut, perikanan, peternakan, dan perdagangan terutama perdagangan eceran

Kondisi sosial-ekonomi Sumenep dipengaruhi oleh dua ekosistem yakni tegalan dan pesisir. Masyarakat Sumenep yang tinggal di bagian selatan mayoritas bekerja sebagai petani garam, nelayan dan pelayaran. Mata pencaharian mereka yang tinggal di bagian dalam beradaptasi dengan ekologi tegalan, sehingga mayoritas mereka adalah petani. Walaupun ekonomi Sumenep didominasi oleh pertanian, tetapi ekosistem tegalan di Madura tidak cocok bagi pertanian padi dan tebu. Komoditas tanaman seperti tembakau dan jagung mampu beradaptasi dengan tanah tegalan yang kering dan tandus (Jonge, 1989, p. 46; Leunissen, 1989, pp. 229–249).

Pada abad ke-19, Sumenep merepresentasikan kota dagang yang cukup ramai. Beberapa komoditas yang diperjualbelikan adalah kulit, tembakau, minyak, kapuk, gula aren, gula siwalan, gula tarebung dan ikan. Untuk komoditas beras, kapuk, minyak bumi, dan linen sebagian besar dikuasai oleh pedagang China, Arab, dan para Haji. Sumenep juga mengekspor kacang, singkong, ketela, gula lokal, ikan nener, buah-buahan, asam jawa dan ikan asin (ANRI, Algemene Secretarie Verslagen Madoera 1916, p. 7).

Selanjutnya, ekologi pesisir yang meliputi bagian selatan Sumenep memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat Sumenep. Pada abad ke-19, orang-orang pribumi Sumenep sibuk dalam pengangkutan antar-pulau dan kapal-kapal mereka menyusuri pesisir Pantai Utara Jawa dan Banjarmasin. Usaha pelayaran

yang dimiliki penduduk lokal Sumenep kemudian bersaing dengan kapal uap milik Eropa (Lombard, 1996, p. 98; Snelleman, 1905, p. 15; Wilde, 1913, p. 284)

Menurut Masyhuri (1995, pp. 65–66 & 186), daerah pesisir Sumenep yang tidak maju dalam pertanian, berhasil mengembangkan usaha penangkapan ikan. Para nelayan di Sumenep menggunakan sistem jemputan/*ngadang*. Ditambah lagi, industri garam di Sumenep sangat membantu dalam usaha pengasinan dan pengawetan ikan. Berdasarkan laporan J. Clark kepada Raffles, pada awal abad ke-19, Sumenep telah mengekspor 1.167 pikul ikan asing ke berbagai daerah yang ada di luar Pulau Madura dan Jawa. (ANRI, Madoera, 1813, p. 1-9).

Alam Madura yang panas menguntungkan bagi produksi garam di Sumenep. Sejak akhir abad 19 sampai awal abad 20, Sumenep merupakan wilayah yang sangat maju dalam pengembangan industri garam kolonial. Garam diekstraksi dari tiga tempat yakni Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Kalianget). Untuk mengakselerasi pemasaran garam, pemerintah kolonial membentuk dua maskapai—*Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan *Madoera Stroomtram Maatschappij* (MSM) pada akhir abad ke-19 (Parwoto, 1996, p. 57; Syafi'i, 2021, p. 10; Wilde, 1913, p. 132).

Realitas historis tersebut menegaskan bahwa ekologi pesisir menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sumenep. Hal tersebut seringkali terlupakan dalam narasi sejarah Madura yang digeneralisasikan dengan sistem ekologi tegalan yang tidak produktif. Adanya dua kekuatan itu menjadikan Sumenep sebagai wilayah strategis bagi aktivitas perdagangan Nusantara. Dari jalur Selat Madura, para pedagang Timur Asing seperti China dan Arab-Hadrami masuk ke pusat ekonomi Sumenep (Tjiptoatmodjo, 1983, p. 79).

Migrasi dan Terbentuknya Komunitas Hadrami di Sumenep

Sumenep menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang cukup menonjol di Jawa Timur sejak abad ke-15, sehingga banyak pedagang, dan pelaut muslim Asing yang singgah di pelabuhan Kalianget (Indonesia-Belanda, 1979, p. 101; Zulkarnain, 2012, p. 67). Gresik merupakan gerbang masuk pedagang muslim Asing ke kota-kota pantai di Madura seperti Sumenep (Raffles, 1978, p. 75). Pengaruh sosial-keagamaan pedagang Arab-Hadrami sejatinya dapat ditelusuri jauh sampai pada periode pengaruh Walisanga dan Kerajaan Demak atas Sumenep pada akhir abad ke-14 (Werdisastra, 1996, pp. 123–24; Indonesia-Belanda, 1979, p. 101; Pigeaud & Graaf, 1974, p. 197).

Dalam catatan Raffles disebutkan bahwa Raja Chermen mengutus Sayyid Ja'far ke sebuah kota pantai di Madura untuk menyebarkan Islam, kemudian ia meninggal di sebuah desa Plakara pada abad ke-14 (Raffles, 1978, p. 114). Dalam cerita rakyat Sumenep disebutkan pula bahwa pada abad ke-15 seorang pedakwah bernama Sayid Ali Murtafala (*Ratu Pandita*) datang ke Pulau Sepudi-Sumenep untuk menyebarkan ajaran Islam. Setengah abad kemudian (1550-an), Sayid Ahmad Baidhowi menyiarkan Islam ke Sumenep (Zulkarnain, 2012, p. 67). Akan tetapi, penggunaan gelar “sayid” di kalangan raja-raja Islam lokal telah banyak digunakan jauh sebelum migrasi kedua orang-orang Hadrami ke Nusantara pada abad ke-19

Meskipun kontak ekonomi Sumenep dengan pedagang Arab terjalin sejak masa Walisanga, tetapi proses ekonomi tersebut tidak cukup untuk menjelaskan proses islamisasi pulau Madura. Menurut Mansurnoor (1990, p. 09), proses islamisasi yang massif di Madura disebabkan oleh terjadi konversi agama yang terjadi di kalangan

aristokrat. Pada abad ke-19, banyak pedagang elit Hadrami datang ke Keraton Sumenep untuk mengajarkan agama Islam kepada keluarga bangsawan Sumenep. Mereka mengenalkan paradigma Islam Hadadiyah kepada penguasa Islam lokal di Sumenep.

Sultan Abdurrahman/Pakunataningrat I (1811-1854), raja ketiga dari Dinasti Ayutirtanegara di Sumenep, dikenal sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Otoritas religius raja Sumenep ini diejawatahkan dalam bentuk pembuatan sebuah al-Qur'an dalam ukuran yang sangat besar dan ditulis tangan (Bustami, 1990; Ihsani, 2020, p. 45, 2021). Ketertarikan Sultan kepada bahasa Arab, tasawuf, dan hukum Islam mendorong Sultan untuk mengundang beberapa cendekiawan dari kalangan Arab sayid yaitu Sayid Abdurrahman al-Baiti dan Sayid Syakh bin Ahmad Bafagih (Berg, 2010, p. 108).

Selain itu, kemajuan transportasi kapal uap, pembukaan terusan Suez serta kemajuan ekonomi kolonial di Jawa memantik terjadinya migrasi pedagang Arab ke Jawa, termasuk Sumenep pada abad ke-19. Perkembangan dunia ekonomi diaspora Hadrami di Hindia-Belanda memunculkan permintaan akan “*syaikh ta'lim*/pengajar agama” dari Hadramaut untuk memberikan pencerahaan keagamaan bagi para saudagar beserta keluarganya dan keluarga bangsawan (Alatas, 2024, p. 61).

Akomodasi sosial-keagamaan Sultan Sumenep menstimulus pedagang Arab untuk menetap. Adapun komunitas dan perkampungan khusus menjadi wadah bagi pembentukan identitas kolektif mereka. Sejak tahun 1832, pedagang Arab di Sumenep telah memiliki sebuah perkampungan yang dipimpin oleh seorang kepala koloni Arab. Bahkan, Sebagian orang-orang Arab di Sumenep ini berpindah dan membuat pemukiman cabang baru yang ada di Pulau Pamanukan (Berg, 2010, p. 108). Akan tetapi, berdasarkan penelusuran arsip, penulis menemukan seorang kepala koloni Arab Sumenep bernama Syarif Thalib bin Ahmad Albakhie, yang diangkat oleh pemerintah pada tahun 1850 (Delpher.nl, Regerings Almanak, 1850, p. 64).



Gambar I

Sayid Syekh bin Ahmad Bafaqih berdiri di sebelah kanan-belakang bersama Panembahan Natakusuma II (Raden Muh. Shaleh)

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>

Kemakmuran didapatkan oleh pedagang Arab selama Sultan Abdurrahman memimpin Sumenep. Sebagai pengasuh bagi keluarga raja Sumenep, Sayid Syakih bin Ahmad Bafaqih mendapatkan gaji yang diambil pajak desa di Sumenep. Selama 25 tahun bersama Sultan, dia mendapatkan tunjangan besar dan gaji pensiun dari putra sulung Sultan yakni Panembahan Mohammad Saleh. (Berg, 2010, p. 150) Realitas historis di atas menunjukkan bahwa perkembangan sosial-ekonomi orang-orang Arab-Hadrami di Sumenep didukung oleh patronase yang terbangun dengan penguasa Sumenep (Mandal, 2018, p. 31).

Patronase ini kemudian tidak hanya mengambil bentuk secara sosial-keagamaan saja, tetapi juga membangun hubungan sosial-ekonomi antara Aristokrat Sumenep dengan pedagang Hadrami. Mereka mendapatkan preferensi dari Sultan untuk menarik pajak pertanian kepada para petani garam. Hal ini berlangsung sampai penghapusan sistem swapraja di Sumenep. Peluang untuk menarik pajak pertanian memberikan jalan bagi orang-orang Hadrami untuk melakukan akumulasi kapital bagi perdagangan mereka (Clarence-Smith, 2009, p. 153).

Tidak hanya privilese berupa gaji dan lisensi untuk menarik pajak, pedagang Hadrami di Sumenep sudah mendapatkan izin untuk berdagang di pasar-pasar seperti Pasar Pabean dan Pasar Marengan di Sumenep. Mereka dikenakan *wang popon* atau pajak pasar yang disewakan panembahan kepada kelas menengah pribumi bernama Samiun. Pajak pasar ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi pedagang Hadrami saja, tetapi pedagang Pribumi, Tionghoa dan pedagang Asing lainnya wajib memberikan pajak pasar dalam jumlah yang cukup besar (Kuntowijoyo, 2017, p. 160).

Sebagai sebuah komunitas, pergantian kepemimpinan kerap kali terjadi dalam sebuah koloni Arab. Transisi ini terjadi pada 16 Mei 1859, yakni ketika Sayid Mohammad bin Ali Alhadat terpilih sebagai kepala koloni untuk menggantikan Syarif Ahmad Albakhie. Kepala koloni yang baru ini merupakan pedagang dan pengusaha pelayaran yang terkenal di kalangan orang-orang Arab di Sumenep. Pada 1869, ia tercatat telah memiliki Kapal Nawan Eljoesoer yang dinahkodai oleh Monteiro (Delpher.nl, 1869, p. 387). Sebagai usahawan dan pedagang besar di Sumenep membuatnya pantas menjadi kepala Arab di Sumenep selama delapan belas tahun.

Sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan komunitas Arab Sumenep, kepemimpinan Sayid Mohammad bin Ali Alhadat diteruskan oleh keturunannya yang bernama Sayid Ali bin Mohammad Alhadat pada 3 Desember 1877 (Delpher.nl, 1869, p. 387). Dalam kasus ini, pola kepemimpinan perkampungan Arab di Sumenep didasarkan atas pewarisan keturunan. Proses pewarisan kepemimpinan ini dalam komunitas Arab di Sumenep hanya dapat dimungkinkan apabila suatu keluarga atau *fam* memiliki status sosial-ekonomi yang lebih baik dari marga-marga Arab lainnya dalam suatu koloni.

Oleh karena itu, dalam memilih seorang pemimpin, orang Arab tidak hanya memandang ciri-ciri fisik yang dapat diturunkan secara genetis, tetapi kebangsawanan dan kepemimpinan dapat diwariskan selama *fam*/marga itu dipersepsikan sebagai golongan yang unggul baik secara sosial maupun ekonomi dalam komunitas Arab (Subchi, 1998, p. 59). Dari sini tampak jelas bahwa Alhadat pada pertengahan abad ke-19 merupakan keluarga Arab yang dominan secara sosial-ekonomi di Sumenep.

Perubahan Relasi Antara Bangsawan dan Pedagang Hadrami

Pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa Sultan Sumenep memiliki minat yang cukup besar untuk belajar pengetahuan Islam kepada cendekiawan Hadrami. Hal itu dapat dibuktikan dengan keberadaan beberapa cendekiawan Hadrami yang

membantu Sultan dalam mengajari keluarganya mengenai Islam. Artinya, hubungan patronase itu dilandasi oleh motif sosial-keagamaan. Dalam perkembangannya, relasi itu berubah bentuk dalam hubungan sosial-ekonomi, khususnya perdagangan.

Hubungan harmonis raja Sumenep dengan pedagang Arab hanya menguat selama tiga dekade saja, khususnya pada masa Sultan Abdurrahman. Ketika Sultan Sumenep wafat, kesejahteraan pedagang Arab di Sumenep mengalami kemunduran, tetapi bukan secara kuantitas. Artinya, dukungan sosial-ekonomi yang mereka dapatkan dari Sultan Sumenep perlahan-lahan menurun. Meskipun demikian, Panembahan Natakusuma II/Raden Mohamad Saleh Natanegara (1854-1879) selama menggantikan Sultan Abdurrahman masih memberikan tunjangan kepada cendekiawan Hadrami yang bekerja di Keraton (Berg, 2010, p. 108).

Sumenep tidak lagi menguntungkan bagi para cendekiawan dan pedagang Hadrami pasca Sultan mangkat. Pajak perdagangan yang tinggi dikenakan kepada mereka, sehingga kekayaan mereka semakin tergerus. Oleh sebab itu, sebagian berpindah ke kota besar yang ada di Jawa, seperti Sayid Syeikh bin Ahmad Bafaqih meninggalkan Sumenep menuju ke Batavia. Perpindahan cendekiawan Hadrami ini berkorelasi dengan degradasi budaya ilmu di Sumenep. Meskipun demikian, budaya ilmu yang dikembangkan oleh raja Sumenep dan cendekiawan Hadrami sebelumnya tidak seluruhnya hilang.

Beberapa pendatang Arab baru (*wulaiti*) seperti Syeikh Khalid bin ‘Abd Allah al-Qana’i masih mengajarkan Islam di Keraton Sumenep. Syeikh Khalid yang berasal dari ‘Otub, di dekat Bassora, Hadramaut menjadi pendatang baru (*wulaiti*) di Sumenep pada 1857. Bahkan pada 1866, ia mengarang sebuah kitab yang berjudul *Tuhfatal Ikhwani*. Terdapat juga seorang Arab-Hadrami dari kalangan budak yang pandai dalam sastra dan enam orang Arab-Hadrami campuran yang bergiat di bidang pengajaran pasca Sultan wafat (Berg, 2010, p. 151).

Pada saat relasi paternalistik mulai memudar, beberapa beberapa para kapitalis Hadrami di Sumenep masih menjalankan aktivitas perdagangannya pada 1866. Mereka melakukan resistensi terhadap kebijakan kolonial yang bersifat diskriminatif terhadap perdagangan mereka. Munculnya perlawanan tersebut disebabkan oleh pajak perdagangan yang terlalu tinggi serta kebijakan Surat Jalan yang membatasi mobilitas perdagangan mereka. Ditambah lagi, perdagangan orang-orang Hadrami di Sumenep selalu menjadi sasaran bagi pengawasan polisi kolonial (KITLV, Kolonial Verslag, 1866, p. 05). Adanya resistensi tersebut menandakan bahwa mereka sebagai suatu komunitas diaspora telah memiliki solidaritas sosial-ekonomi yang cukup kuat sekalipun raja lokal tidak lagi memihak.

Keretakan hubungan sosial-ekonomi Bangsawan dengan pedagang Hadrami semakin tampak pada masa kepemimpinan Pangeran Aria Mangkudinigrat (1879-1901). Hal ini disebabkan ketidaksukaan dan kecurigaan pemerintah kolonial kepada diaspora Hadrami sehingga kalangan bangsawan Sumenep enggan untuk menikahkan putrinya dengan mereka. Sekalipun keluarga Bangsawan Sumenep masih bersahabat dengan cendekiawan dan pedagang Arab, tetapi tidak seorang pun dari orang Arab yang berhasil mengawini putri-putri keluarga bangsawan Sumenep (Berg, 2010, p. 185)

Munculnya kebencian pemerintah kolonial terhadap pedagang Hadrami disebabkan mereka dinilai fanatik terhadap agama yang dipeluk. Selain itu, sebagian orang Hadrami melakukan peminjaman uang secara kredit kepada para Bangsawan. Namun, kedua alasan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya keretakan sosial kelas Bangsawan dengan pedagang Arab. Kenyataan lain ditemukan dalam *Babad*

Songennep (1971) bahwa memudahkan relasi keduanya disebabkan oleh perilaku ekonomi sebagian Arab yang eksploitatif dan tidak jujur. Mereka datang ke Keraton menawarkan barang dagangannya dengan harga yang terlampau mahal dan terkesan tidak jujur (Werdisastro, 1971, p. 131). Transaksi jual-beli ini tercatat dalam *Babab Songennep* sebagai berikut:

Adapun Panembahan Natakusuma III itu tidak peduli pada besaran uang. Seumpama ada orang (pedagang) menawarkan barang, ditawarkan dengan harga tiga riyal (f.6) langsung mengatakan begini “Itu terlalu mahal. Biarkan jika boleh saya akan beli seharga (f.20)”. Sungguh orang yang menjual barang tersebut sangat senang. Biasanya orang Arab sangat antusias melakukan perdagangan dengan Panembahan sebab banyak (orang Arab) yang menjadi kaya.

Sejak Pangeran Aria Mangkudiningrat menduduki kuasa Panembahan, orang Arab dilarang masuk ke Keraton, sebelumnya diizinkan oleh Pangeran Aria Mangkudiningratan, penyebabnya orang-orang Arab yang sama senang (berdagang) ke Panembahan, ketika sudah masuk ke Keraton sambil lalu membawa barang dagangannya. Setelah bertemu dengan Panembahan langsung ditawarkan barangnya, serta (pedagang Arab) suka memuji berlebihan barang dagangannya...dan mengatakan besar modal untuk membelinya, sesungguhnya harga f.10/sepuluh rupiah (namun) ditawarkan seharga f.300/tiga ratus rupiah. Ternyata Panembahan tidak peduli kepada jumlah uang yang besar, barang langsung diambil sesuai harga yang diucapkan pedagang Arab.

Kutipan di atas menggambarkan suatu perilaku ekonomi sebagian saudagar Arab Sumenep yang eksploitatif dan tidak jujur. Realitas historis di atas menggambarkan sosok Arab sebagai pedagang keliling. Menariknya, mereka menjual dagangannya dengan harga yang sangat tinggi dari modal awal mereka. Ketidakjujuran yang mewarnai perdagangan mereka membuat kalangan Bangsawan enggan untuk menjalin hubungan jual-beli dengan mereka. Retaknya relasi ini menjadi wajar sebab kalangan Aristokrat Sumenep menjunjung tinggi moral ekonomi masyarakat Madura yang disebut *tangka* (Utsman, 2018, p 177). Dalam kosmologi ekonomi Madura, *tangka* memiliki dua asas legalitas perdagangan yakni formal dan kultural. Legal kultural ini kemudian dijunjung tinggi oleh kalangan Bangsawan dan masyarakat lokal sebab aktivitas perdagangan seringkali diwarnai dengan kecurangan dan kebohongan.

Aspek lain yang tercatat dalam teks babad tersebut adalah potret gaya hidup Bangsawan Sumenep pada akhir ke-19 yang boros dan gemar foya-foya. Mereka berani membeli suatu barang dengan harga yang melebihi harga penawaran. Perilaku yang konsumtif para Aristokrat Sumenep itu dimanfaatkan oleh pedagang Arab untuk mengakumulasi profit dari praktik perdagangan mereka yang terkesan curang dan tidak jujur. Hal itu kemudian menjadi alasan pelarangan dan pembatasan pedagang Arab untuk melakukan tindakan transaksional di Keraton Sumenep.

Meskipun keluarga bangsawan mulai tidak bersimpati kepada orang Hadrami, tetapi wilayah Sumenep tetap menarik perhatian pedagang Hadrami pada dekade terakhir abad ke-19. Seorang pendatang Arab baru (wulaiti) bernama Syeikh Moehamat bin Said Basabeh tinggal dan berdagang di Sumenep pada Oktober 1897 (ANRI, Besluit, 1898). Tidak hanya Sumenep, Pamekasan—sebagai konsentrasi orang Arab terbesar kedua setelah Sumenep—menjadi tujuan ekonomi kelompok masyasyikh Hadramut seperti Syeikh Awad bin Said bin Koeddah Alomah (1892), Syeikh Achmad bin Abdullah Wahdin Basarahil (1894), Syeikh Djenit bin Mohamad Bawazir (1895) (ANRI, Besluit, 1896b, 1896a). Periode 1890-an merupakan titik awal bagi keterbukaan ekonomi Madura

sehingga peluang itu memantik kedatangan pedagang Hadrami yang baru (*wulaiti*) ke Sumenep dan Pamekasan.

Perilaku Sosio-Ekonomi Diaspora Hadrami Pasca Reorganisasi Sumenep 1883

Sejak reorganisasi Sumenep, relasi patrimonial antara Aristokrat Sumenep dengan kelas pedagang mulai terputus. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi dan diversifikasi pola pekerjaan masyarakat setempat. Beberapa pekerjaan seperti penyewa pajak dihapuskan oleh pemerintah kolonial. Kelas-kelas abdi yang berprofesi sebagai pengrajin secara perlahan mulai melepaskan diri dari subordinasi Panembahan Sumenep. Mereka mencari patron baru di pasaran kerja. Penghapusan pancen (jasa layanan kerja) juga memberikan peluang dikenalkannya sistem upah uang dan mulai terjadi perkembangan pasaran tenaga kerja (Kuntowijoyo, 2017, p. 232).

Periode ini menjadi titik mula dari kebangkrutan bangsawan Sumenep. Mereka kehilangan akses terhadap pajak pertanian dan pajak usaha di desa-desa percaton dan tidak mendapatkan *pancen*. Sebagian besar bangsawan rendah dipecat dan Bupati baru sebagai keturunan raja terakhir mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah yang digaji langsung (Kuntowijoyo, 2016, pp. 88, 97). Saat itu pula raja Sumenep tidak lagi menguasai tanah-tanah di Sumenep. Sistem *landrente* diberlakukan dengan menyerangkan tanah-tanah raja kepada penggarapnya (Boomgaard, 2004, p. 94).

Pada akhir dasawarsa abad ke-19, para pedagang (termasuk pedagang Arab) memainkan peranan penting bagi kehancuran sistem percaton. Para pedagang yang kaya akibat perdagangan lokal dan interlokal mulai membeli hak penarikan pajak pertanian, tanah, dan pasar. Hak-hak upeti telah menjadi komoditas yang dikapitalisasi, bahkan tanah-tanah *apanage* diperjualbelikan kembali. Sebagai akibatnya, elit tradisional Sumenep jatuh ke dalam cengkraman para kapital Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab (Kuntowijoyo, 2016, p. 103).

Rusaknya sistem percaton di Sumenep berimplikasi besar terhadap pergeseran kepemilikan tanah di Sumenep kepada para kapitalis Timur Asing. Tanah warisan (*tana sangkolan*) yang dominan ini banyak jatuh ke tangan pedagang Tionghoa dan Hadrami yang kaya. Kelonggaran dalam sistem kepemilikan tanah di Sumenep membuka peluang bagi beberapa kapital Hadrami dan Tionghoa di Sumenep untuk bisa memiliki tanah tegalan dan pekarangan yang ada di desa-desa (Bergsma, 1896, pp. 100–102).

Mengenai transisi kepemilikan *tana negeri* kepada pedagang Hadrami ini terjadi di Kalianget Timur pada 1899. Dua bidang tanah di Kalianget Timur yang pada akhir abad-19 merupakan tanah negeri milik Raden Adipati Ario Pratamingkoesoemo jatuh ke tangan keluarga Arab yakni Syeikh Hasan bin Abdoellah Bagraf. Kemudian, keluarga Arab ini menjualnya kembali kepada Sayid Agil bin Hamza Yahya dan Syarifah Fatima binti Sayid Djakfar Alhadad (ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris*, 1939, pp. 1-8)

Di tengah merosotnya kaum Bangsawan, pedagang Hadrami di Sumenep bersama pedagang China tampil sebagai peminjam uang atau kreditor. Para rentenir Asing ini menyasar keluarga bangsawan Sumenep. Ketidakmampuan dalam melunasi hutang tersebut memaksa keluarga bangsawan tersebut menyerahkan saudara perempuannya kepada kreditor Hadrami (Kuntowijoyo, 2017, p. 246). Kredit menjadi basis materil yang diupayakan oleh pedagang Arab di Sumenep dalam bertahan di tengah perubahan. Ketika bangsawan Sumenep kehilangan akses ekonominya pasca reorganisasi, relasi Aristokrat dengan pedagang Arab bertransformasi menjadi relasi hutang-piutang.

Menurut L.W.C van den Berg (2010, p. 125), aktivitas peminjaman uang di kalangan saudagar Hadrami kepada pribumi sebagai usaha komplementer mereka

seringkali disertai dengan bunga yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka seringkali dinarasikan sebagai “lintah darat”. Perbuatan yang melenceng dari hukum Islam ini dirilis dalam sebuah koran Arab. *Comite Almadhjar* melayangkan permohonan maaf atas tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian dari bangsa Arab sekaligus memberikan kritik terhadap jurnalis-jurnalis yang melakukan *labelling* secara tidak adil (*Almahdjar: Oentoek Kepentingan Bangsa Arab Di Seloeroe Indonesia*, 1934, p. 01).

Terlepas dari polemik itu, perdagangan tetap menjadi sumber ekonomi mereka. Aktivitas perdagangan (warung dan pertokoan) mereka terus bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi di Sumenep. Pada tahun 1890, para pedagang Hadrami mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan beras dengan memperjual-belikannya sebanyak 1000 koyang beras pertahun. Dalam kasus pertanian padi ini, pada 1890, Sumenep tidak banyak mengalami kegagalan, sehingga wilayah itu tidak memerlukan impor beras (KITLV, Koloniaal Verslag, 1892, p. 08).

Pertumbuhan ekonomi mereka pasca reorganisasi Sumenep dapat diukur dari jumlah pajak usaha individu yang dibayarkan kepada pemerintah kolonial. Pada 1897, setiap pedagang Arab di Sumenep membayar pajak usaha sebesar f. 8.99. Besaran pajak usaha individu orang Arab di Sumenep terus meningkat hingga mencapai f. 9.85 pada 1899 (KITLV, Kolonial Verslag, 1900, p. 12). Akan tetapi, rata-rata pendapatan ekonomi para kapitalis Timur Asing di Madura tidak lebih rendah dari pendapatan ekonomi para pedagang pribumi. Secara komparatif, pendapatan pedagang Asing berkisar satu banding sepuluh atau sepersepuluh, sedangkan pendapatan orang-orang Belanda mencapai seperlimapuluh dari pendapatan penduduk pribumi Madura (Rifai, 2017, p. 132).

Perkembangan ekonomi orang Arab dan Tionghoa mendapatkan stimulus yang cukup besar pasca liberalisasi ekonomi Madura pada akhir abad ke-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya suntikan modal usaha dari para importir Eropa sebanyak f10.000 setiap dua sampai enam bulan. Dalam laporan L.W.C. van den Berg, tercatat bahwa pedagang Arab-Hadrami Sumenep berhasil membangun dua belas firma dengan suntikan modal usaha sebesar f10.000 (Berg, 1886, pp. 146–147). Walaupun demikian, kondisi perdagangan di Sumenep tidak selalu sejahtera setiap tahunnya.

Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengembangkan bisnis perkapalan sebagai sumber ekonomi alternatif. Usaha pelayaran komunitas Arab di Sumenep sejatinya telah mengalami kemajuan pada 1866. Sayid Mohamad bin Ali Alhadat, Syeikh Achmad bin Obit Bahabbasiy, Syeikh Salim bin Obit Bahabbasiy, Syeikh Abdullah bin Oemar Bagraf, dan Syeikh Salim bin Said Achmat Amar adalah para pengusaha kapal di Sumenep (Delpher.nl, Regering Almanak, 1869, p. 387). Usaha itu sempat mengalami kemerosotan pada 1877-1880 karena persaingan dengan transportasi pengangkutan milik Tionghoa. Akan tetapi, pada 1890 mereka mulai menjalankan bisnis pelayaran dan perkapalan kembali berupa sekunar dan sebagian kapal uap. Usaha perkapalan mereka bahkan digunakan untuk memasuk barang-barang dagang (impor) (KITLV, Koloniaal Verslag, 1892, p. 08).

Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Sumenep merupakan cara mereka bertahan dan berjejaring di tengah arus perubahan sosial yang terjadi di Sumenep. Kebijakan liberalisasi ekonomi Madura oleh pemerintah kolonial pasca reorganisasi memberikan stimulus bagi orang-orang Arab untuk giat dalam berdagang dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya. Bahkan, usaha perkapalan dan pengangkutan yang dikembangkan oleh komunitas Arab di Sumenep mampu bersaing dengan usaha pengangkutan (garam) yang dimonopoli oleh *Madoera Stoomtram Maatschappij*. Mereka menetapkan tarif pengangkutan yang lebih murah

daripada tarif pengangkutan perusahaan swasta Belanda (KITLV, Koloniaal Weekblad, 1903, No. 34).

KESIMPULAN

Awal abad ke-19 menjadi titik terbentuknya solidaritas dan komunalitas pedagang Hadrami di Sumenep. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya sebuah perkampungan Arab dengan seorang kepala koloni di Sumenep pada 1832. Eksistensi mereka di Sumenep dipengaruhi oleh relasi patronase yang terbentuk antara kelompok sayid dengan Aristokrat Sumenep, khususnya dengan Sultan Abdurrahman/Pakunataningrat (1811-1854). Relasi itu pada mulanya bersifat sosial-keagamaan semata, tetapi kemudian berkembang menjadi relasi sosial-ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelas pedagang Arab-Hadrami yang juga menawarkan barang dagangannya kepada keraton Sumenep.

Akan tetapi, pasca Sultan wafat (1854), perhatian raja Sumenep terhadap pedagang *cum* cendikiawan Hadrami mulai meredup. Akibatnya, kesejahteraan mereka pada paruh kedua abad ke-19 yang didapatkan dari raja Sumenep mulai menurun. Disamping itu, pengawasan dan pembatasan yang cukup ketat terhadap pedagang Arab di Sumenep oleh pemerintah Belanda menjadi faktor penting dari munculnya gejolak dan protes sosial dari kalangan pedagang Arab-Hadrami.

Ketika pemerintahan lokal Sumenep mulai merosot, pemerintah kolonial memberlakukan penghapusan pemerintahan swapraja. Reorganisasi itu menimbulkan berbagai macam kerugian ekonomi kelas bangsawan Sumenep yang tidak lagi memiliki akses terhadap pajak desa. Di sisi lain, pedagang khususnya di kalangan diaspora Arab-Hadrami semakin menguat di Sumenep karena beberapa firma Hadrami mendapatkan suntikan modal dari pemerintah kolonial. Mereka juga membangun relasi kapitalistik dengan bangsawan di Sumenep dalam bentuk peminjaman uang (kredit).

Terlepas dari perilaku tersebut, koloni Arab-Hadrami di Sumenep menggantungkan sumber ekonominya kepada perdagangan baik sebagai pemilik toko, pedagang besar, pedagang keliling/eceran dan sebagainya. Tidak hanya perdagangan, mereka yang menetap di pesisir—wilayah industri garam kolonial seperti Kalianget—mengembangkan usaha pengangkutan dan pelayaran. Mereka yang memiliki perahu dan kapal terlibat dalam pendistribusian garam dan ekspor-impor komoditas komersil lainnya ke wilayah luar Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd A'la, Mukhammad Zamzami, dan Nur Hidayat Wakhid Udin, dan A. F. A. (2018). Islamism in Madura: From Religious Symbolism to Authoritarianism. *Journal of Indonesian Islam*, 12(02), 159–193.
- Alatas, I. F. (2024). *What Is Religious Authority: Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah* (A. Baiquni (ed.)). Bentang Pustaka.
- Algadri, M. H. (1996). *Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda* (III). Mizan.
- Almahdjar: Oentoek Kepentingan Bangsa Arab di Seloeroe Indonesia* (No. 04). (n.d.).
- ANRI. (1813). An Annual Statement of the Export and Import to Java and Islands beyond

- Java at The Port of Sumanap for the Year 1813. In *Madoera*. Nomor Arsip. No. 7.
- ANRI. (1896a). Besluit No. 24, Ag. 7689, Buitenzorg, 18 November 1896. In *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*. Nomor Arsip 357.
- ANRI. (1896b). Besluit No. 26, Ag. 10012, Buitenzorg, 17 Augusten 1896. In *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*. Nomor Arsip 428.
- ANRI. (1897). Algemene Verslag Madoera van 1897, No. 419/12 C, Bijlagen. 02. In *Algemene Secretarie Serie Verslagen (1825) 1830-1940*. Nomor Arsip: 328.
- ANRI. (1898). Besluit No. 38, Buitenzorg, 9 Januari 1898. In *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*. Nomor Arsip 559.
- ANRI. (1916). Gewestelijk Bestuur van Madoera, No. 2844/12d, Pamekasan, 4 Maart 1916. In *Algemene Secretarie Serie Verslagen (1825) 1830-1940*. Nomor Arsip 328.
- ANRI. (1939). Missive Gouvernement Secretaris, No. 152, Ag. 1517/04, 14 Maret 1939. In *Departement van Binnenlandsch Bestuur Grote Bundel Afdeeling E 1860-1942*. Nomor Arsip 477.
- Artono. (2021). *Komunitas Arab di Kota Surabaya 1900-1942* (S. Z. Umaroh (Ed.)). Penerbit Kendi.
- Athoillah, A. (2018). Pembentukan Identitas Sosial Komunitas Hadhrami di Batavia Abad XVIII-XX. *Lembaran Sejarah*, 14(2), 150–170.
- Berg, L. W. . van den. (2010). *Orang Arab di Nusantara* (R. Hidayat (Ed.)). Komunitas Bambu.
- Berg, L. W. C. van den. (1886). *Le Hadhramout et les Colonies Arabes dans L'archipel Indien*. Imprimerie du Gouvernement.
- Bergsma, W. B. (1896). *Eindresume van het bij de Gouvernements Besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 Bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Ground op Javan en Madoera, Jilid III, Bijlagen D*. Landsdrukkerij.
- Boomgaard, P. (2004). *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (S. M. Abdi (Ed.)). Djambatan & KITLV.
- Bustami, A. L. (1990). Santri Sebagai Penguasa: Dinasti Bendara Saud di Kasultanan Sumenep Abad XVIII. *Pesantren*, VII(01), 66–76.
- Clarence-Smith, W. G. (2009). Entrepreneurial Strategies of Hadrami Arabs in Southeast Asia, C. 1750s-1950s. In A. I. A. dan H. A. Ibrahim (Ed.), *The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia: Identity Maintenance or Assimilation?* Brill.
- Delpher.nl. (1850). *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1850*. Landsdrukkerij.
- Delpher.nl. (1869). *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869*. Landsdrukkerij.
- Delpher.nl. (1879). *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1879*. Landsdrukkerij.
- Fatihah. (2016). *Sejarah Komunitas Arab di Yogyakarta Abad XX* (P. Sudarmo (Ed.)). Magnum Pustaka Utama.
- H.J. De Graaf, T. P. (1974). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik*

Abad XV dan XVI. Grafiti.

- Hidayatullah, A. A. J. I., & Adam, Y. F. (2022). Gerakan Islam Modern Komunitas Arab di Solo, 1912-1942. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 19(2), 132–144. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2>.
- Husain Haikal. (2019). *Indonesia-Arab: Dalam Pergerakan Kemerdekaan* (M. Muqoddam (Ed.)). FORUM.
- Ihsani, A. (2020). *Kebangsawanan di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep Tahun 1950-an (Tesis)*. Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Ihsani, A. (2021). From The Palace-Pendopo to The Pesantren Rooms : The Dynamics of Aristocrats and a Kiai Relationship in Sumenep 1750-1950s. *Islamuna, Jurnal Studi Islam*, 8(1), 1–21.
- Indonesia-Belanda, P. P. M. K. (1979). *Madura III: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Jonge, H. de. (1989). *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jonge, H. de. (2011). *Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi* (A. Arifin (Ed.)). LKiS.
- Jonge, H. de. (2019). *Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)* (A. B. Prasetyo (Ed.)). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Karim, A. G. (2009). The Pesantren-Based Ruling Elite in Sumenep in The Post-New Orde Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 03(01), 97–121.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- KITLV. (1866). *Koloniaal Verslag Bijlage C 1866*.
- KITLV. (1885). *Koloniaal Verslag Bijlage C 1885*.
- KITLV. (1892). *Koloniaal Verslag 1892 Bijlage C*.
- KITLV. (1900). *Koloniaal Verslag 1900, Bijlage C*.
- KITLV. (1903). *Het Koloniaal Weekblad Orgaan de Vereeniging Oost en West, Donderdag, 5 November 1903, 3de Jaargang, No. 34*.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedu). Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2016). *Petani, Priayi, dan Mitos Politik: Esai-Esai Sejarah*. MataBangsa.
- Kuntowijoyo. (2017). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (I. Risdiyanto (Ed.)). IRCiSoD.
- Leunissen, J. (1989). Pertanian Rakyat di Mudara. In H. de Jonge (Ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Rajawali.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia*. Gramedia Pustaka Utama.

- Mandal, S. K. (2018). *Becoming Arab: Creole Histories and Modern Identity in the Malay World*. Cambridge University Press.
- Mansurnoor, I. A. (1990). *Islam in an Indonesian World Ulama of Madura*. Gadjah Mada University Press.
- Mansurnoor, I. A. (1992). Local Initiative and Government Plans : “Ulama” and Rural Development in Madura Source. *Sojourn : Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 7(1), 69–94. <https://www.jstor.org/stable/4105712>
- Masyhuri. (1995). *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Yayasan Pustaka Nusatama & KITLV.
- Mobini-Kesheh, N. (1999). *The Hadrami Awakening: Community and Identity in The Netherlands East Indies, 1900-1942*. Southeast Asia Program Publications.
- Ongkhokham. (2017). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* (J. Rizal (Ed.); III). Komunitas Bambu.
- Parwoto. (1996). *Monopoli Garam di Madura 1905-1920 (Tesis)*. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Pribadi, Y. (2013). Religious Networks in Madura: Pesantren , Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture. *Al-Jami’ah*, 51(01), 1–32.
- Pribadi, Y. (2015). The Suramadu Bridge Affair: Un-bridging the State and the Kyai in New Order Madura. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 22(2), 233–267.
- Rabith Jihan Amaruli, Nazala Noor Maulany, S. T. S. (2018). Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang-Orang Arab-Hadrami di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 03(02), 121–132.
- Raffles, T. S. (1978). *The History of Java Volume One*. Oxford University Press.
- Rifai, M. A. (2017). *Lintasan Sejarah Madura*. LPPM Universitas Trunojoyo & Penerbit Elmatara.
- Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, B. P. (2013). *Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya*. Penerbit Ombak.
- Siddiq, A. (2021). *Kristen Madura: Agama, Identitas, dan Pergulatan Sosial*. Cantrik Pustaka.
- Snelleman, J. F. (1905). *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Vierde Deel*. Martinus Nijhoff & E. J. Brill.
- Subarkah, A. (1990). *Pengaruh PAN-Islamisme Terhadap Kebangkitan Golongan Arab di Jakarta, 1901-1941 (Tesis)*. Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Subchi, I. (1998). *Masyarakat Keturunan Arab di Kota Gresik: Studi Tentang Perubahan dan Pelestarian Kebudayaan (Tesis)*. Program Pascasarjana, Prodi Antropologi, Universitas Indonesia.
- Sulasman, R. N. (2020). Perkembangan Komunitas Arab di Indonesia: Studi Kasus Perkampungan Masyarakat Arab di Pekojan Jakarta Barat Pada Tahun 1950-2018. *Historia Madania*, 04(02), 247–268.

- Syafi'i, I. (2021). *Sejarah Garam: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981*. LIPI Press.
- Tjiptoatmodjo, F. A. S. (1983). *Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura: Abad XVII sampai Medio Abad XIX (Disertasi)*. Ilmu Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Utsman, H. (2018). *Tengka: Etika Sosial Dalam Masyarakat Tradisional Madura (Tesis)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Werdisastra, R. (1996). *Babad Sumenep (Babad Songgennep)* (M. T. Hadi (Ed.)). Percetakan Garoeda.
- Werdisastro, R. (1971). *Babad Songgennep* (R. M. W. Sastranegara (Ed.)). Tanpa Penerbit.
- Wilde, M. A. N. de. (1913). *Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java en Madoera (Nijverheid, Handel, Bijdragen aan de Gemeenschap, de Gouvernementsmonopolien, de Algemene Middelen tot Bevordering van den Welvaartstoestand)*. N. V. Boekh Visser & Co.
- Zulkarnain, I. (2012). *Sejarah Sumenep*. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.